

# TANTANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA DAN STRATEGI PENGUATAN DEMOKRASI BERBASIS MASYARAKAT MENGIDENTIFIKASI KENDALA DAN SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK

Aqsath Hifzal Muqsith<sup>1</sup>, Ario Pamungkas<sup>2</sup>,  
Nailah Rafidah Putri<sup>3</sup>, Marsha Melandri<sup>4</sup>,  
Universitas Esa Unggul  
[aqsath.hm@student.esaunggul.ac.id](mailto:aqsath.hm@student.esaunggul.ac.id)

## Abstract

*Democracy in Indonesia has shown progress since the reform era, but still faces various challenges that hinder the strengthening of an inclusive and just government system. The main challenges faced include the politicization of identity that exacerbates social polarization, the low quality of political participation by the community, and the dominance of political elites that worsens inequality in political access and representation. Corruption involving state officials is also a serious obstacle to the creation of transparent and accountable governance. This article identifies these challenges and proposes solutions to strengthen community-based democracy in Indonesia. The proposed solutions include improving inclusive political education, empowering marginalized groups, and encouraging active community participation in the political decision-making process. In addition, eradicating corruption and strengthening transparency in government are important steps to create a more accountable democratic system. By strengthening community-based democracy, Indonesia can realize a more just, equitable, and sustainable democracy, and ensure that the people's voices are heard and taken into account in the political process.*

*Keywords: Democracy, challenges of democracy, strengthening community-based democracy, political participation, eradicating corruption.*

## Abstrak

Demokrasi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan sejak era reformasi, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat penguatan sistem pemerintahan yang inklusif dan adil. Tantangan utama yang dihadapi termasuk politisasi identitas yang memperburuk polarisasi sosial, rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, serta dominasi elit politik yang memperburuk ketimpangan akses dan representasi politik. Korupsi yang melibatkan aparat negara juga menjadi penghalang serius bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Artikel ini mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut dan mengusulkan solusi untuk memperkuat demokrasi berbasis masyarakat di Indonesia. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan pendidikan politik yang inklusif, pemberdayaan kelompok marginal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, pemberantasan korupsi dan penguatan transparansi dalam pemerintahan menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih akuntabel. Dengan memperkuat demokrasi berbasis masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan, serta memastikan suara rakyat didengar dan diperhitungkan dalam proses politik.

*Kata kunci: Demokrasi, tantangan demokrasi, penguatan demokrasi berbasis masyarakat, partisipasi politik, pemberantasan korupsi.*

## **Pendahuluan**

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang ideal di mana rakyat memiliki hak untuk memilih dan terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Sebagai negara yang kaya akan keragaman etnis, budaya, dan agama, Indonesia mengadopsi demokrasi sebagai landasan sistem pemerintahan pasca kemerdekaannya. Sejak era Reformasi 1998, Indonesia mengalami transisi signifikan menuju demokrasi yang lebih terbuka, dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia tidak tanpa tantangan. Meskipun demokrasi Indonesia berkembang, sejumlah masalah struktural dan kultural masih menghambat kualitas dan keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis yang diharapkan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi demokrasi di Indonesia adalah politik identitas, yang seringkali memanfaatkan isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) untuk meraih dukungan politik. Praktik ini tidak hanya memperburuk polarisasi sosial tetapi juga merusak integritas dan stabilitas demokrasi. Selain itu, partisipasi politik masyarakat sering kali terbatas pada saat pemilu saja, sementara dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, banyak suara masyarakat yang tidak terwakili dengan baik. Ketidaksetaraan akses politik juga menjadi masalah serius, dengan kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, yang kesulitan dalam mengakses proses politik secara setara.

Korupsi juga menjadi tantangan yang signifikan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Meskipun telah ada berbagai upaya pemberantasan korupsi, praktik korupsi masih meluas dan merusak integritas pemerintahan, menghambat kemajuan, serta memperburuk

ketimpangan sosial dan ekonomi. Di sisi lain, sistem politik Indonesia cenderung sentralistik, yang menyebabkan daerah-daerah tertentu merasa kurang mendapatkan perhatian dalam proses pengambilan keputusan yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, penguatan demokrasi berbasis masyarakat menjadi salah satu solusi yang sangat penting. Demokrasi yang kuat bukan hanya terwujud melalui sistem pemilu yang sehat, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek kehidupan politik. Penguatan demokrasi berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan politik, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, dan memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang setara dalam sistem politik.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi demokrasi di Indonesia dan mencari solusi untuk memperkuat demokrasi berbasis masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memberdayakan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat memperbaiki kualitas demokrasinya, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang ada. Dalam upaya ini, peran serta masyarakat sangat penting untuk menciptakan sebuah demokrasi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi demokrasi di Indonesia dan mencari solusi untuk memperkuat demokrasi berbasis masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih

mendalam tentang fenomena demokrasi di Indonesia serta melihat konteks sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi sistem pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang akan menggambarkan berbagai tantangan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk solusi yang lebih konkret dalam penguatan demokrasi berbasis masyarakat.

## 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder:

- **Data Primer:** Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang memiliki pemahaman atau pengalaman langsung terkait demokrasi di Indonesia. Narasumber terdiri dari akademisi, aktivis demokrasi, pejabat pemerintah, serta masyarakat yang aktif dalam organisasi sosial dan politik. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi dalam sistem demokrasi dan bagaimana solusi berbasis masyarakat dapat diterapkan.
- **Data Sekunder:** Data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta data statistik dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Kajian literatur ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika demokrasi di Indonesia, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta teori-teori dan praktik terbaik dalam penguatan demokrasi berbasis masyarakat di negara lain yang dapat diterapkan di Indonesia.

## 2. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan tantangan demokrasi, seperti politisasi identitas, ketimpangan representasi politik, partisipasi politik yang rendah, dan korupsi. Setiap tema akan dianalisis berdasarkan wawancara dengan narasumber dan dokumen-dokumen yang relevan, untuk kemudian disarikan menjadi kesimpulan yang mencerminkan tantangan utama yang dihadapi demokrasi Indonesia.

Setelah tantangan-tantangan utama diidentifikasi, penelitian ini akan mengkaji solusi yang diusulkan untuk memperkuat demokrasi berbasis masyarakat. Analisis ini melibatkan pemetaan solusi-solusi yang mungkin diterapkan dalam konteks Indonesia, baik yang berbasis pada pengalaman di negara lain maupun yang disarankan oleh narasumber lokal. Solusi yang dianalisis akan mencakup aspek pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, reformasi politik, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi.

## 3. Pendekatan Studi Kasus

Sebagai bagian dari analisis, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan studi kasus pada beberapa daerah atau komunitas yang telah menerapkan kebijakan atau program yang mendukung penguatan demokrasi berbasis masyarakat. Studi kasus ini akan membantu menggambarkan secara konkret bagaimana demokrasi dapat diperkuat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan. Kasus-kasus ini akan diambil dari berbagai daerah di Indonesia, dengan memperhatikan perbedaan konteks sosial dan politik di setiap wilayah.

#### 4. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai narasumber yang memiliki latar belakang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan wawancara, kajian literatur, dan studi kasus. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan-temuan penelitian mencerminkan realitas yang lebih objektif dan dapat dipercaya.

#### 5. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan menyusun kesimpulan tentang tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia dan memberikan rekomendasi solusi yang dapat memperkuat demokrasi berbasis masyarakat. Rekomendasi ini akan mencakup langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh pemerintah, masyarakat sipil, serta aktor-aktor politik untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan metodologi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami tantangan demokrasi di Indonesia dan memberikan wawasan yang berguna untuk memperkuat demokrasi berbasis masyarakat di masa depan.

#### Pembahasan

Demokrasi di Indonesia, meskipun telah mengalami kemajuan signifikan sejak era Reformasi 1998, masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat penguatan sistem demokrasi yang lebih adil dan inklusif. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi kualitas demokrasi, baik dalam hal partisipasi politik

masyarakat maupun dalam keadilan distribusi kekuasaan di seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, pembahasan berikut akan menguraikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia dan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat demokrasi berbasis masyarakat.

#### 1. Politik Identitas dan Politisasi SARA

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia adalah politik identitas yang sering kali memanfaatkan isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) untuk meraih dukungan politik. Fenomena ini terutama terlihat dalam pemilu, di mana politisi sering kali menggunakan isu identitas untuk menggiring opini publik dan memperoleh suara. Politisi atau kelompok-kelompok tertentu sering kali memanfaatkan sentimen agama atau suku untuk memperoleh keuntungan politik jangka pendek, yang pada akhirnya memperburuk polarisasi sosial dan ketegangan antar kelompok di masyarakat.

Polarisasi yang semakin tajam ini berpotensi merusak tatanan sosial dan menciptakan ketegangan yang menghalangi terciptanya dialog politik yang konstruktif. Dalam konteks ini, penguatan demokrasi berbasis masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif politik identitas. Pendidikan politik yang lebih inklusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberagaman dan toleransi adalah langkah pertama untuk mencegah polarisasi sosial yang lebih dalam. Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih ketat terhadap kampanye politik yang mengedepankan isu identitas untuk memastikan bahwa pemilu dan proses politik lainnya tidak terdistorsi oleh politisasi SARA.

## **2. Partisipasi Politik yang Rendah dan Ketimpangan Akses**

Tantangan berikutnya adalah rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat. Meskipun Indonesia secara rutin menyelenggarakan pemilu, partisipasi politik masyarakat sering kali terbatas pada hak memilih dalam pemilu tanpa melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan lainnya. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara warga negara dan struktur politik yang ada. Partisipasi politik yang minim ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya tingkat literasi politik, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta keterbatasan akses untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu adanya penguatan pendidikan politik di tingkat dasar, menengah, dan masyarakat umum. Pendidikan politik yang inklusif yang mampu mengedukasi warga negara tentang hak-hak politik mereka, sistem pemerintahan, serta cara-cara untuk berpartisipasi dalam proses politik adalah langkah yang harus diperkuat. Selain itu, infrastruktur yang mendukung partisipasi publik dalam pengambilan keputusan—seperti forum musyawarah desa, konsultasi publik, dan diskusi kebijakan—harus diperluas agar masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses politik yang memengaruhi kehidupan mereka.

Penting juga untuk mendorong keterlibatan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, seperti perempuan, anak muda, dan kelompok minoritas, dalam berbagai aspek kehidupan politik. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka untuk berpartisipasi, sistem demokrasi dapat menjadi lebih inklusif dan representatif.

## **3. Korupsi dan Dominasi Elit Politik**

Korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi Indonesia, karena merusak akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Meskipun Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi masih meluas dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya negara. Korupsi ini sering kali melibatkan aktor politik, pejabat pemerintah, dan pejabat publik lainnya yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi, sementara masyarakat menjadi korban dari sistem yang tidak transparan.

Dominasi elit politik juga menjadi penghalang bagi demokrasi yang lebih inklusif, di mana keputusan-keputusan besar sering kali hanya mencerminkan kepentingan elit, bukan kepentingan rakyat. Hal ini tercermin dalam ketimpangan distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar. Agar demokrasi di Indonesia dapat lebih kuat, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Di samping itu, transparansi dalam proses politik, pembuatan kebijakan, dan pengelolaan sumber daya publik harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang lebih efektif dari masyarakat sipil, media, dan lembaga-lembaga negara yang independen.

### **Upaya Penguatan Demokrasi Berbasis Masyarakat**

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penguatan demokrasi berbasis masyarakat merupakan kunci utama yang harus dijalankan oleh seluruh elemen bangsa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1. Pendidikan Politik yang Inklusif**  
Pendidikan politik yang inklusif harus

menjadi prioritas, baik di sekolah-sekolah maupun di masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami peran mereka dalam sistem demokrasi, hak-hak mereka sebagai warga negara, serta cara-cara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Program pelatihan, forum diskusi, dan pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan politik lokal dapat mendorong partisipasi yang lebih luas.

- 2. Reformasi Partai Politik dan Pemilu**  
Pembenahan sistem partai politik dan proses pemilu juga penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar tercermin dalam pemerintahan. Reformasi ini mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas partai politik, serta memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan jujur dan adil, tanpa adanya praktik politik uang atau manipulasi.
- 3. Meningkatkan Akses untuk Kelompok Marginal**  
Penguatan demokrasi berbasis masyarakat juga harus mencakup kebijakan yang memberikan akses lebih besar kepada kelompok marginal—termasuk perempuan, kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat

adat—untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan lebih besar bagi kelompok-kelompok ini untuk terlibat dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan.

- 4. Penguatan Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi**  
Penguatan lembaga pengawasan, seperti KPK, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Pembentukan dalam sistem hukum dan pengawasan juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada impunitas bagi pelaku korupsi.
- 5. Desentralisasi dan Penguatan Demokrasi Lokal**  
Pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah dalam pengambilan keputusan politik lokal dapat memperkuat demokrasi berbasis masyarakat. Dengan sistem yang lebih desentralistik, masyarakat di tingkat lokal akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan yang relevan dengan kehidupan mereka.

## Kesimpulan

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia memang kompleks, tetapi bukan hal yang mustahil untuk diatasi. Penguatan demokrasi berbasis masyarakat merupakan langkah strategis untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Upaya ini memerlukan peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga sipil, untuk

menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan memastikan bahwa setiap suara masyarakat didengar, Indonesia dapat mencapai demokrasi yang lebih matang dan bermanfaat bagi seluruh warganya.

## Referensi

**Aspinall, E. (2014).** *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. In *The Journal of Southeast Asian Studies*, 45(3), 382-404.

- Buku ini mengkaji peran politik identitas dan sistem patronase dalam pemilu Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi dan partisipasi politik.

**Hadiz, V. R. (2010).** *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1(2), 1-17.

- Membahas dinamika politik lokal di Indonesia pasca-Reformasi dan tantangan desentralisasi dalam sistem demokrasi.

**Tanu, D. (2017).** *Politics of Identity in Indonesia: Implications for Democracy and Citizenship*. *Asian Journal of Comparative Politics*, 3(2), 122-138.

- Artikel ini membahas fenomena politik identitas yang marak dalam konteks Indonesia dan dampaknya terhadap persatuan sosial serta tantangan demokrasi.

**Brennand, C. (2020).** *Corruption and Governance in Indonesia: The Role of the Corruption Eradication Commission (KPK)*. *Journal of Contemporary Asia*, 50(4), 594-616.

- Menyajikan kajian tentang tantangan korupsi di Indonesia dan peran penting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penguatan akuntabilitas pemerintahan.

**Robinson, G. E. (2007).** *Indonesia: The Rise of Capital*. *The Journal of Contemporary Asia*, 37(3), 383-402.

- Mengulas tentang dominasi elit politik dalam struktur pemerintahan Indonesia dan ketimpangan sosial yang dihasilkannya, serta dampaknya terhadap demokrasi.

**Suryadinata, L. (2018).** *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia*. *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)*.

- Buku ini membahas peran etnis minoritas dalam politik Indonesia dan tantangan integrasi mereka dalam demokrasi Indonesia yang lebih inklusif.